



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 209/KMK.05/2021

TENTANG

**PENETAPAN**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA,  
POLITEKNIK NEGERI BALI, DAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
  - b. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 126151/MPK.A/KU/2020 tanggal 14 Desember 2020, Nomor 136082/MPK.A/KU/2020 tanggal 23 Desember 2020, dan Nomor 143233/MPK.A/KU/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Permohonan Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah mengajukan permohonan agar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Politeknik Negeri Bali dan Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-02/Tim-Penilai/2021 tanggal 29 Maret 2021, BA-03/Tim-Penilai/2021 tanggal 29 Maret 2021, BA-05/Tim-Penilai/2021 tanggal 5 April 2021, dan BA-06/Tim-Penilai/2021 tanggal 5 April 2021, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Politeknik Negeri Bali dan Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Politeknik Negeri Bali dan Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA, POLITEKNIK NEGERI BALI DAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- PERTAMA : Menetapkan :
1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Politeknik Negeri Bali pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  4. Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- KEDUA : Status Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Politeknik Negeri Bali dan Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

- KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Politeknik Negeri Bali dan Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

fk



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
19. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Direktur Politeknik Negeri Bali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

25. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Denpasar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,  
Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH *AM*  
NIP 19730213-199703 1 001



*f*